

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan¹. Dari definisi tersebut jelas bahwa salah satu yang harus dipahami adalah tentang organisasi, organisasi jika dilihat dari tujuannya dapat digolongkan pada organisasi yang bertujuan mencari laba dan organisasi yang bertujuan selain laba. Organisasi yang bertujuan selain mencari laba dikenal sebagai Akuntansi Sektor Publik (ASP). Organisasi sektor publik yang paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintah.

Diselenggarakannya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan transparan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, termasuk juga Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *good governance*

¹ Catut Sasongko dkk, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta;Salemba Empat, 2016) hlm.2

tersebut dengan menerapkan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), SAP selanjutnya akan diperinci lagi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 juni 2005². Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Pada sektor publik khususnya pemerintahan jelas bahwa yang diakuntansikan adalah uang atau dana rakyat maka dari itu pengelolaannya harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik semakin meningkatkan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, akuntansi sektor publik dengan segala kekhasannya serta sistem dan lingkungannya tidak terlepas dari jenis organisasi itu sendiri. Karakteristik dari organisasi publik yang kompleks, rumit, penuh nuansa politis, dan kaku memengaruhi khususnya organisasi pemerintahan.

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan *good governance* ditunjukkan kembali dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

² Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta; Salemba Empat, 2014)

Setelah itu, dikeluarkan pula UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Setelah UU tersebut selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dengan semakin meningkatnya peran daerah dalam pengelolaan keuangan tuntutan untuk lebih mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara horizontal dan vertikal semakin tinggi. Akuntabilitas pemerintah terwujud dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Hal ini berangkat dari pengalaman bentuk krisis yang merupakan kegagalan dalam pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan keuangan yang akan penulis teliti disini yaitu terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang dapat dikaitkan dengan praktek akuntansi yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-qur'an dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat dalam ayat tersebut, sedang mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi.³ Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan dua orang saksi. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil

³ Rizal yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta; Salemba Empat,2014) hlm.2

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “⁴

Standar akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba . Laporan keuangan berdasarkan PP No 71 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dan laporan keuangan PSAK 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Data awal yang peneliti dapat meliputi Neraca Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2017 dan 2016 , laporan operasional Pemerintah Kota Banjarbaru untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2017 dan 2016 , laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Banjarbaru periode 1 Januari sd 31 Desember 2017 dan terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 .

Kemudian mengapa peneliti mengambil wilayah penelitian di Banjarbaru, karena kota Banjarbaru merupakan pertemuan beberapa wilayah strategis yang

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah Indonesia Inggris* (solo: qomari, 2008), hlm. 29

menghubungkan Banjarmasin-Kotabaru, Banjarmasin-Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, juga akses pelabuhan laut Trisakti sebagai gerbang jalur transportasi laut dan akses Bandar Udara Syamsuddin Noor sebagai jalur transportasi udara di Kalimantan Selatan.

Hal ini membuat industri dan perdagangan sangat potensial dikembangkan di daerah ini. Disamping itu Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru merupakan percontohan dan panutan baik itu instansi di Banjarbaru ataupun diluar daerah Kota Banjarbaru jadi setiap aturan baru yang diterapkan akan mempengaruhi standar operasional yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Apakah penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ?
2. Apakah alasan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam penyajian laporan keuangan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Mengetahui alasan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam penyajian laporan keuangan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintahan masih sangat jarang dilakukan oleh karena itu hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan kita mengenai akuntansi sektor publik khususnya instansi pemerintahan seperti Dinas perdagangan Kota Banjarbaru;

2. Kepada pihak Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber rujukan dan informasi mengenai penyajian laporan keuangan berbasis akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas perdagangan Kota Banjarbaru;
3. Kepada seluruh Pihak pegawai Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pengetahuan guna memperbaiki setiap pekerjaan kedepan;
4. Kepada pimpinan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia dan diharapkan berguna untuk pengambilan keputusan kebijakan.
5. Kepada Pemerintah Kota Banjarbaru peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

E. Defenisi Operasional

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dan supaya pembahasan masalah lebih terfokus serta spesefik maka diberikan penjelasan sebagai berikut,

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁵ Analisis yang dimaksud peneliti disini adalah mengetahui keadaan sebenarnya antara Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan realisasinya di Instansi pemerintah itu sendiri dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terkait penerapan laporan keuangan pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
2. Penerapan berasal dari kata “terap” yang artinya pemasangan, pengenaaan, perihal, mempraktikkan. Maksudnya dalam melaksanakan laporan keuangan Pemerintah Kota Dinas Perdagangan Banjarbaru apakah telah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu PP No 71 tahun 2010 dan PSAK No 45
3. Akuntansi Pemerintahan merupakan turunan dari akuntansi sektor publik, sektor publik terkait dengan kepentingan publik atau masyarakat (*public interest*) kepentingan publik tersebut terkait dengan politik dan pemerintahan hal inilah yang membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah. Dan disini penulis memfokuskan penelitian kepada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang digunakan dalam Laporan Keuangan milik Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh sebab itu

⁵ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: kashiko)hlm,43

penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang di antaranya sebagai berikut, yaitu penelitian Mutiara, penelitian Fitri Purnamasari dan penelitian milik Lia aryatie.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2016) Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 106 yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Kayu Tangi penelitian dan memfokuskan pada permasalahan PSAK No.106 berupa pengakuan akuntansi pembiayaan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi antara teori dan praktik yang ada dilapangan dengan membandingkan antara PSAK 106 dan penyajian laporan keuangan bank muamalat . Adapun perbedaan yang pertama terletak pada standar atau aturan yang digunakan apabila skripsi mutiara menggunakan PSAK 106 sedangkan penelitian saya menggunakan PSAK 45 dan PP No 71 tahun 2010, kemudian perbedaan yang lain yaitu terletak pada tempat melakukan penelitian adapun penelitian Mutiara dilakukan di lembaga keuangan bank yakni Bank Muamalat sedangkan penelitian saya dilakukan di Intansi Pemerintahan yakni Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Dan perbedaan selanjutnya itu terletak dari jenis Akuntansi yang dipakai apabila penelitian Mutiara menggunakan Akuntansi

Perbankan sedangkan penelitian saya menggunakan Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintahan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari (2016), Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Malang dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No.45 pada yayasan di Kota Malang” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No.45 pada yayasan di Kota Malang dan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan PSAK No.45 pada yayasan-yayasan di Kota Malang, serta mengulas faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari penerapan PSAK tersebut. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang organisasi nirlaba yang menerapkan akuntansi berdasarkan PSAK 45 namun pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri Purnamasari hanya terfokus pada PSAK 45 sedangkan pada penelitian saya selain PSAK 45 juga membahas masalah PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selain itu perbedaan yang lain terdapat pada tempat penelitian apabila penelitian oleh Fitri Purnamasari pada sebuah yayasan di kota Malang lain halnya dengan penelitian saya yang bertempat di Instansi Pemerintahan di kota Banjarbaru.⁷

Skripsi oleh Lia Aryatie (2018), Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul

⁶ Mutiara, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2016

⁷ Fitri Purnamasari, “Analisis Penerapan PSAK No.45 pada yayasan di Kota Malang” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Malang, 2016

“Perlakuan Akuntansi Syariah Pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin dan penelitian ini memfokuskan pada proses pencatatan atau sistem akuntansi pembiayaan KPR menurut PSAK 102 yang menggunakan akad murabahah. Persamaan terletak pada sama-sama ingin mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi antara teori dan praktik yang ada di lapangan dengan membandingkan antara PSAK 102 dengan pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin. Meski memiliki kesamaan karena mengangkat masalah penerapan standar akuntansi namun skripsi Lia Aryatie memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dalam hal tempat penelitian skripsi Lia aryatie melakukan penelitiannya di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sedangkan saya di Dinas Perdagangan kota Banjarbaru kemudian perbedaan yang lain skripsi Lia aryatie membahas tentang akuntansi syariah sedangkan saya membahas tentang masalah akuntansi pemerintahan.⁸

⁸ Lia Aryatie, “Perlakuan Akuntansi Syariah Pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut,

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini diantaranya berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti mengangkat masalah tersebut, disini peneliti mencoba mengungkapkan permasalahan antara standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah dengan kenyataan riil nya dilapangan dalam hal ini laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Kemudian ada rumusan masalah dimana peneliti merumuskan poin-poin masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini lalu tujuan penelitian yang memuat capaian dari hasil yang diteliti kemudian pada signifikansi penelitian akan dipaparkan manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian saya terhadap pihak-pihak yang terkait selanjutnya ada defenisi operasional bagian ini mengemukakan pengertian dari masing-masing indikator untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan keluar dari masalah, pada kajian pustaka memuat sejumlah penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang saya teliti sebagai pembanding dan menjelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu. Terakhir sistematika penulisan berisi penjelasan naratif tentang subtansi-subtansi bahasan pada penelitian ini.

Bab kedua yaitu landasan teori yang memuat teori-teori yang dipakai yang menjadi dasar dalam penelitian ini dimana akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang

relevan dan mendukung dari buku, penelitian terdahulu dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang mana membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat adalah bab terakhir yakni bab penutup yang berisi simpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait baik itu Dinas Perdagangan kota Banjarbaru sendiri ataupun instansi-instansi pemerintahan lainnya yang mana dirasa penulis perlu.